



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN
2024

RENCANA **KERJA**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. dkukmpp@balangankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.24/029 /SK/DKUKMPP-BLG/2023

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 17 Juli 2023

Kepala Dinas, 



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERIDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/023/SK/DKUKMPP-BLG/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor : 800/029/SK/DKUKMPP-BLG/2023 pada tanggal 17 Juli 2023.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan kosumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

ly
h

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	64
3.3 Program dan Kegiatan.....	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	75
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan.....	76
4.2 Analisa Sosial Ekonomi	76

4.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan .	83
BAB V PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Balangan.....	6
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Perdagangan Tahun 2022.....	24
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	30
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	47
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan.....	66
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2024 dengan fokus utama adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja), dimana Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja ini sangat penting bagi SKPD sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pada tahun 2024 nantinya.

yang mana proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana Program/Kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024 adalah sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun anggaran 2024, dimana di dalamnya memuat evaluasi dari target Renstra di tahun 2022 serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Renja ini bersama Renja SKPD lingkup Kabupaten Balangan yang lain menjadi

bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024.

Secara umum tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program serta terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan
- 4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2022 secara keseluruhan telah melaksanakan 14 Program, 22 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, dimana dari program tersebut terdapat 13 program prioritas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutiak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut.

Secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut. Pada tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Balangan
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

URISAN BIDANG URUSAN, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KEMERJAAN (RENJASTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (N-3) TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENJASTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6+8)	10 = (9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82.2	72.09	74.98	74.88	100.00	74.4	74.4	98.81
	PERSERTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKKAN.UTU)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH Persentase Pemyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	85.5	0	77.84	77.84	100.00	87.96	87.96	92.10
		100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	2	1	1	100.00	2	2	35.71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	5	2	2	100.00	5	5	37.50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3178	210	238	238	100.00	546	546	31.28
Pelaksanaan Pemasahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemasahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	12	12	12	100.00	12	12	42.86

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAH KELUARAN KEGIATAN SUB DENGAN TAHUN (N-3) TH 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	0	4	4	100,00	5	5	10,00
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Penyediaan komponen mediaasi (sistem) pencetakan bangunan kamar	Jumlah paket komponen mediaasi (sistem) pencetakan bangunan kamar yang disediakan (Paket)	7	1	1	1	100,00	1	1	42,86
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kamar	Jumlah paket pembelian dan perlengkapan kamar yang disediakan (Paket)	35	0	12	12	100,00	4	4	45,71
Penyediaan Bahan Logistik Kamar	Jumlah paket Bahan Logistik Kamar yang disediakan	3	0			0,00			0,00
Penyediaan barang celakan dan penggantian	Jumlah paket barang celakan dan penggantian yang disediakan (Paket)	14	2	2	2	100,00	2	2	42,86
Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	21	3	3	3	100,00	3	3	42,86
Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	7	1	1	1	100,00	1	1	42,86
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	18				0,00			0,00

URUSAN/BEKAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJTA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-2) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Penggadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	3 51	4 0	5 6	6 0,00	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	1	1	100,00	1	1	42,86
Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor yang disediakan (Laporan)	7	1	1	100,00	1	1	42,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100,00	100	100	100,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan penorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan penorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	55	0	35	100,00	35	35	63,64
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	0	14	100,00	14	97	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	0	1	100,00	1		25,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	6	1	1	100,00	1		33,33
PROGRAM PENGAWASAM DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF (%)	66,00	0	0	0,00	0	63,38	96,05

URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA MASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DEWAN TAHUN (N-1) TH 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET REHSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2022
1 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/sumbu simpus pijam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Persentase Koperasi Taat Peraturan (%)	3 34,00	4 0	5 6	6 0	7 = (5/3) 0,00	8 32,39	9 = (4 + 6 + 8) 32,39	10 = (9/3) 96,26
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemampuan, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dibuktikan Penguasaan Kekuatan, Kesehatan, Kemampuan, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12	0	0	0	0,00	6	6	50,00
Penertarikan Kepedulian Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	23	0	0	0	0,00	23	23	100,00
Felaksasi Proses Pemekasaan dan Penguasaan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dibuktikan Pemertasaan dan Penguasaan (Unit Usaha)	26				0,00			0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI (%)	90	0	100	100	100,00	100	100	111,11
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Koperasi yang Memperoleh pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (%)	24	0	44,7	44,7	100,00	20,54	20,54	85,58
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang memahami Peningkatan Pemahaman (Orang)	352	100	37	37	100,00	85	85	63,07
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Usaha Mikro yang Dilaksanakan (Kali)	2	0			0,00	2	2	100,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro (Orang)	60	0			0,00	60	60	100,00

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/IS UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJTA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENJTA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8) TAHUN 2022	10 = (9/3)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA (%)	80	0	55	55,00	100,00	60	60	75,00
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, pembinaan, kelembagaan, penjaminan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	MENERAPKAN E-COMMERCE (%)	0,23	0	0,14	0,14	100,00	0,14	0,14	60,07
	Persentase Usaha Mikro yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro (%)	6,4	0	0,25	0,25	100,00	0,27	0,27	67,50
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4,3	0	3,2	3,20	100,00	3,5	3,5	81,40
	Persentase Usaha Mikro yang Bermiliter (%)	0,25	0	0,14	0,14	100,00	0,14	0,14	56,90
Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bertambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, pembinaan manajemen, standarisasi, dan institusialisasi usaha koperasi kewirausahaan kabupaten/kota (Unit Usaha)	10804	11217	8209	8,208	100,00	11030	11030	101,16
Pemberdayaan melalui pembinaan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan pembinaan usaha mikro (Unit Usaha)	28	0	12	12	100,00	12	12	42,80
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah memeroleh pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro (Unit Usaha)	160	0			0,00			0,00
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar (Unit Usaha)	12017				0,00			91,79
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH (%)	0,73	0	2,53	2,53	0,00	0,53	0,53	72,60

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-1) TH 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REKJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERFORMAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7 = (5/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat (%)	1.01	0	2.53	2.53	0.00	0.63	0.63	62.36
Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang bertumbuh dalam pengembangan produk dalam dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi (Unit usaha)	787	0	208	208	100.00	70	70	35.32
Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	531				0.00			0.00
PEMINKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	30	0	0	0	0.00	0	0	0.00
Pembangunan dan Pangelebaran Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang difortifikasi (%)	100	41.07	50	50	100.00	50	50	50.00
Penyelesaian Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	27	3	1	1	100.00	6	6	37.04
Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	12	9	9	9	100.00	9	9	75.00
Pembiayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	100	0			0.00	15.00	15.00	15.00
Pembiayaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	0			0.00	1	1	20.00
Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5	0			0.00	1	1	20.00

URUSAN JIBDANG URUSAN Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJA DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2 PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	3 100	4 0	5 0	6 0	8 0	9 = (4 + 5 + 6) 0	10 = (9/3) 0,00
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	100	0	0	0	0	0	0,00
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	16	0	0	0	0	0	0,00
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	0	0	0	0	0	0,00
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15	0	0	0	0	0	0,00
PROGRAM PENGUMUMAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang ditama (Pelaku Usaha)	3	0	0	0	0	0	0,00
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	25	0	0	0	0	0	0,00
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	2.100.000,000	0	0	0	0	0	0,00
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	45,45	0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah UKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kembaraan dengan retail, marketplace, perhibenan dan jasa akomodasi (UMKM)	10	0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	1	0	0	0	1	1	100,00

URUSAN / BIDANG URUSAN, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJANG) PERANGKAT DAERAH TAUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HABIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAUN (N-3) TH 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANG) PERANGKAT DAERAH TAUN (N-1) TH 2022	PERMIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
				TARGET PERANGKAT DAERAH TAUN (N-2) TH 2021	REALISASI PERANGKAT DAERAH TAUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3 35	4	5	5	8	9 = (4 + 6 + 8) TAHUN N-1) TAHUN 2022	10 = (9/3) 0,00
Peminaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kerjasama dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20						0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA, PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%), PENERBITAN IZIN KEGIATAN PENERIDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKUKAN (%)	20	4,8	8,42	100,00	9,34	9,34	49,20
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan (Buah)	100	0	0	0,00	0	0	0,00
Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Penerimaan Komite Penilaian Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	90	0	0	0,00	0	0	0,00
Pemebitan Tanda Daftar Gedung	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gedung (Buah)	4	0	0	0,00	0	0	0,00
Fasilitas Pemebitan Tanda Daftar Gedung	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gedung (Dokumen)	7	0	1	100,00			14,29
		7	0	1	100,00			14,29

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D DEKATAN TAHUN (N-3) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	2 Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	3 13	4 8	5	6 0,00	8	9 = (4 + 6 + 8) 6	10 = (5/3) 46,15
2 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dari/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	3 Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dari/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	13	6		0,00	6	6	46,15
3 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	4 Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (Buah)	1	0		0,00			0,00
4 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dari/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	5 Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dari/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	1	0		0,00			0,00
5 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minum di Tempat	6 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buah)	7	6		0,00			0,00
6 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	7 Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diberikan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7	0		0,00			0,00

URUSAN/REKAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET REKAM URUS PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Kelembagaan (Kali)	3 9	4 0	5 6	7 = (8/5) 0,00	8	9 = (4 + 5 + 6) 10 = (9/3) 0,00	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengurus Ahr Bahan Berbahaya (PA-B2) misalpun Prodiuser B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengusaha Ahr Bahan Berbahaya (PA-B2) misalpun Prodiuser B2 (P-B2) (Laporan)	9	0		0,00		0,00	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buah)	3	0		0,00		0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3	0		0,00		0,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6,8	8,08	7,85	100,00	6,1	6,1	
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	419	52	44	100,00	54	54	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	162	8	3	100,00	36	36	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	0		0,00		0,00	

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET REKONSTRUKSI DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI REKONSTRUKSI DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Pemertuaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan.	2 Jumlah Laporan Pemertuaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3 84	4 12	5 12	6 12	7 = (5/6) x 100,00 100,00	8 12	9 = (4 + 6 + 8) / 12 10 = (8/3) x 42,86
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemertuaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	1	1	1	100,00	1	1
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKUKAN (%)	84,51	46,15	61,53	61,53	100,00	69,23	69,23
	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKUKAN (%)	33,33	0	0	0	0,00	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetriologian yang mengontrol sertifikasi teknis (Orang)	14	4	1	1	100,00	2	2
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Pertengkapannya (UTTP) bertanda Tera Seh (Buah)	1500	860	1067	1067	100,00	1105	1105
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Pertengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buah)	170	0	0	0	0,00	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan, dan alat pertengkapannya ulangi (Unit)	1500	600	1067	1067	100,00	1105	1105
Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang abins (Orang)	350	50	50	50	100,00	50	50
						0,00		

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENJTA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-2) TH 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJTA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJTA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENJTA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2 PERSENTASE IKM YANG MEMERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	3 15	4 4.1	5 6.81	6 8.81	7 = (5/3) 100.00	8 10	9 = (4 + 5 + 6) 16 66.67
Penyesuaian, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	5 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0 0	0.00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	25	100	180	100.00	238	63.47
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sumber Daya Industri (Dokumen)	3	1	1	1	0.00		0.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi (Dokumen)	7	1	1	1	100.00	1	42.86
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2.18	5.81	5.81	-0.20	-153.41	1.36	62.39
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perfusi Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	160	0	2	2	100.00	2	1.25
Facilitasi Penerbitan Kombinasi Pemilikan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kawasan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Ternitratu Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis penerbitan keseluruhan pelepasan teknis penerbitan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka pelaksanaan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4	1	1	1	100.00	1	75.00

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM IRESTRAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN DAERAH TAHUN (N-3) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERIRAAN REALISASI CAPAIAN PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan terhadap Perizinan Berusaha oleh perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS-REA, bagi Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 3	4	5	6	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
7 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submissions Risk Based Approach (OSS RBA)	7 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	7						0.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI & INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	3.58	0	0.13	0.13	0.42	0.42	11.73
Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IRI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM (Rp/jah)	294.48	212.26	231.37	231.37	232.757	252.757	85.82
	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	166	36	39	39	76	76	42.17

URUSAN/RIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2028	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N-3) TH 2028	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DARI KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN
				TARGET RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	REALISASI RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TH 2021	TINGKAT REALISASI (%)		
1 Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	2 Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas); (Dokumen)	3 5	4 0	5 0,00	6 7 = (6/5) 0,00	8 1	9 = (4 + 6 + 8) 1	10 = (9/3) 20,00
Dokumentasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SINas Kabupaten/Kota; (Dokumen)	5	0	0,00	1	1	1	20,00

Patingin, 17 Juli 2023
Kepala Dinas,

H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011990011002

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakanlah program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil dan menengah mulai dari sektor koperasi yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan dan latihan perkoperasian. Seperti diketahui perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kabupaten Balangan berada dalam zona yang kurang menggembirakan. Jumlah koperasi aktif ditahun terakhir 2022 berada di 71 unit koperasi dengan persentasi koperasi aktif sebesar 63,39% dari total 112 unit koperasi yang ada. Diharapkan dari program tersebut dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha koperasi baik pengurus koperasi maupun anggota koperasi. Dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yaitu dengan menyelenggarakan program pengembangan UMKM berupa bantuan alat usaha berupa Both Kontainer sebanyak 20 buah, Bantuan Perlengkapan Peralatan Rumah Kemasan 1 paket, Bantuan Perlengkapan Pembuatan Kue dan Keripik 1 paket, Perlengkapan Alat Pembuat Kue 1 paket, Bantuan Alat Kelompok Pengrajin Anyaman 1 paket, Mesin dan Perlengkapan kerajinan sasirangan 1 paket, Depo Pengisian Galon Isi Ulang dan Perlengkapannya 1 paket bagi pelaku usaha serta bantuan sosial untuk UMKM di Kabupaten Balangan. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha penerima manfaat bantuan tersebut. Selain itu juga fasilitasi penyelenggaraan program pelatihan dari

provinsi yang secara langsung turut andil dalam peningkatan keterampilan UMKM di Kabupaten Balangan.

Untuk urusan pemerintahan perdagangan pada sektor sarana dan pengembangan perdagangan yaitu dengan menyelenggarakan program peningkatan sarana distribusi perdagangan guna membantu meningkatkan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2022 jumlah pasar di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 9 buah. Tahun 2022 kemarin berhasil merealisasikan 6 buah pasar yang dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dari total 9 pasar yang ada atau sebesar 66,67% dengan capaian kinerja 150,02% dari targetnya sebesar 44,44%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dukungan anggaran sehingga bisa melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan lainnya. Jumlah pasar/fasilitas pendukung pasar yang direvitalisasi/dibangun sebesar 6 buah dengan capaian 300,00% dari target sebesar 2 buah.

Kemudian urusan pemerintahan perdagangan lainnya yaitu sektor standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan yaitu dengan menyelenggarakan program perizinan dan pendaftaran perusahaan antara lain fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan serta fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah toko/store yang ada mengalami kenaikan sebesar 250%, pada tahun 2017 berjumlah 2 buah dan diakhir tahun 2022 jumlahnya saat ada 7 buah. Tahun 2022 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan berhasil direalisasikan sebesar 9,84% dengan capaian sebesar 106,26% dari target sebesar 9,26%. Hal ini didorong oleh faktor :

1. Kegiatan sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha yang disertai dengan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan mampu memberikan informasi yang jelas bagi para pelaku usaha mengenai proses pengajuan permohonan pendaftaran perizinan elektronik terintegrasi berbasis resiko (Online Single Submission Risk Based

Approach – OSS RBA) sehingga meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya,

2. Adanya program subsidi bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang mensyaratkan pelaku usaha yang ingin mendapatkan pinjaman usaha berbunga rendah pada perbankan nasional yang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan pinjaman KUR yang mengharuskan pelaku usaha mendaftarkan usahanya dan memiliki NIB.

Pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu dengan menyelenggarakan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar. Tahun 2022 kemarin tercatat *Rata-rata KVpt* (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) adalah 6,10% dengan capaian 78,21% dari target sebesar 7,80%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor :

1. Adanya tambahan tenaga SDM handal yang siap sedia dan mampu dalam melakukan monitoring kegiatan dilapangan
2. Selalu tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diperlukan masyarakat serta jarang terjadi kelangkaan
3. Lancarnya distribusi barang sehingga kebutuhan pokok selalu ada dipasaran
4. Walaupun ada beberapa komoditas barang mengalami kenaikan, namun rasa masyarakat masih terjangkau
5. Adanya kegiatan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Jumlah monitoring informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting berhasil direalisasikan sebesar 54 kali dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 54 kali. Sedangkan jumlah pelaksanaan pasar murah direalisasikan sebesar 38 kali dengan capaian 118,75% dari target sebesar 32 kali.

Pada program standardisasi dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan produk perdagangan yang aman di Kabupaten Balangan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar dan kegiatan tera/tera ulang dan dinyatakan sah untuk digunakan. Tahun 2022 pada kegiatan pengawasan barang beredar direalisasikan sebesar 75,69% dengan capaian 98,30% dari target sebesar 77,00% sedangkan pada kegiatan ditera/tera ulang direalisasikan sebesar 30,32% dengan

capaian 151,60% dari target sebesar 20,00%. Jumlah temuan barang tidak layak edar sebanyak 88 buah dengan capaian sebesar 97,78% dari target 90 buah. Ditahun 2022 terdata sebanyak 61.445 buah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), Jumlah UTTP yang sudah ditera/tera ulang sebesar 1.105 buah dengan capaian 100,45% dari target sebesar 1.100 buah.

Di sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2018-2022 rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,81%. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menggantikan peran sektor pertambangan dimasa mendatang. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB. Tahun 2022 berada diangka sebesar 1,29% dari target 1,98%. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia industri yang dimiliki terutama dalam penguasaan teknologi belum optimal dan belum tersedianya sarana dan prasarana industri (kawasan industri) yang dapat menarik minat investor. Berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin hanya memperlihatkan tren yang stabil tanpa ada peningkatan yang signifikan. Namun realisasi lapangan membuktikan bahwa para pengrajin tetap bertahan dan mengalami kenaikan omset pemesanan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat atas hasil karya dari para pengrajin, selain itu para pengrajin sendiri selalu optimis untuk terus mengaktifkan dan meningkatkan kreatifitas hasil usaha mereka berupa hasil hutan dan kerajinan seperti bambu, bamban, purun serta hasil hutan lainnya untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2022 jumlah IKM sebesar 2.381 IKM dengan pertumbuhan industri kecil menengah di tahun 2022 yaitu sebesar 1,34% dari tahun 2021 sebesar 2.349 IKM.

Dalam upaya meningkatkan sector industri kecil menengah yaitu dengan menyelenggarakan program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Pada tahun 2022 IKM yang menerapkan teknologi industri direalisasikan sebesar 10,00%

dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 10,00%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor :

1. Tersedianya instruktur/pelatih berkompeten
2. Adanya alat produksi dan penunjang lainnya

Dalam meningkatkan sistem jaminan halal, produk industri yang bersertifikat halal direalisasikan sebesar 9,14% dengan capaian sebesar 117,94% dari target sebesar 7,75%. Hal tersebut disebabkan oleh faktor :

1. Konsumen mayoritas beragama Islam
2. Bahan produksi halal mudah didapat
3. Program Sertifikasi Halal Gratis dari Kementerian Agama RI
4. Kesadaran Pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi halal produk makin meningkat.

Untuk pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat	52,17	56,52	108,34
	Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat	25,77	15,94	61,85
	Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	1,98	1,29**	65,15
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,10	5,71**	93,61

Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	2021	2022
-----------	------	------

	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Capaian 2022 terhadap 2026
Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat	57,14	52,17	56,52	108,34	95,38
Rata-rata Capaian				108,34	
				Sangat Tinggi	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat tersebut adalah sebesar **56,52%** atau **108,34%** dari targetnya yang sebesar **52,17%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian "**Sangat Tinggi**". Hal ini diperoleh karena jumlah koperasi yang mendapatkan labanya meningkat dari tahun sebelumnya melebihi dari perkiraan dan target yang ditentukan. Proyeksi koperasi yang diharapkan mendapatkan laba meningkat pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 (dua belas) koperasi dengan target koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 23 (dua puluh tiga) koperasi. Sedangkan realisasi yang dicapai, ternyata terdapat 13 (tiga belas) koperasi yang mendapatkan labanya meningkat dari laba tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- a. Pengelolaan dan pengendalian keuangan koperasi berjalan dengan baik, sehingga mampu mendapatkan laba yang meningkat.
- b. Perolehan laba koperasi juga dipengaruhi oleh biaya operasional koperasi yang rendah dan terkendali sehingga dapat menekan pengeluaran yang tentu akan memberikan imbas langsung pada perolehan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Permasalahan/hambatan :

- a. Masih terdapat koperasi yang belum bisa mengembangkan usaha pasca Pandemi Covid-19. Realisasi usaha koperasi belum maksimal sesuai dengan harapan ataupun target perencanaan usaha koperasi.
- b. Kewajiban koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum dipatuhi oleh sebagian koperasi, sehingga

masih terdapat beberapa koperasi yang tidak dapat diketahui perkembangan usahanya, apakah mendapatkan laba atau rugi.

- c. Adanya koperasi yang tidak aktif secara usaha ataupun kelembagaan.

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat	106,80	25,77	15,94	61,85	61,64
Rata-rata Capaian				61,85 Rendah	

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat tersebut adalah sebesar **15,94%** atau **61,85%** dari targetnya yang sebesar **25,77%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian "**Rendah**". Pada tahun 2022 sektor UMKM mulai pulih dan bangkit dari resesi ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Itu terbukti dari bertambahnya jumlah total UMKM Kab. Balangan di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Namun disaat upaya pemulihan ekonomi nasional dan lokal pasca pandemic, ternyata muncul lagi masalah global baru yaitu adanya perang Rusia-Ukraina, yang kemudian memicu kenaikan harga komoditas khususnya harga BBM dunia. Instabilitas harga global tersebut juga berpengaruh pada kenaikan harga barang di Indonesia khususnya di Kabupaten Balangan. Sehingga berpengaruh juga pada daya beli masyarakat dan pendapatan pelaku UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

Berdasarkan hasil pendataan UMKM tahun 2022, jumlah UMKM di Kabupaten Balangan sebanyak 11.030, diantaranya terdapat 1.758 jumlah UMKM yang labanya meningkat berdasarkan data laporan pendapatan UMKM. Ada beberapa variabel/faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan/laba UMKM pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Normalisasi ekonomi pasca Pandemi Covid-19

- b. Inflasi dan Kenaikan harga barang/ BBM global pasca Perang Rusia-Ukraina
- c. Stimulus pengendalian inflasi berupa Bansos bagi UMKM
- d. Fasilitasi bantuan hibah perlengkapan produksi serta fasilitasi kemitraan
- e. Penyaluran bantuan hibah permodalan bagi UMKM potensial

Permasalahan/ hambatan :

- a. Inflasi dan kenaikan harga barang/BBM cukup membebani
- b. UMKM masih kurang permodalan untuk peningkatan dan pengembangan usaha
- c. Jaringan pemasaran produk UMKM masih belum luas

Indikator	2021	2022		Capaian 2022 terhadap 2026	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	95,96	1,98	1,29**	65,15	63,86
Rata-rata Capaian				65,15 Rendah	

Catatan :

** : Angka rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian tersebut adalah sebesar **1,29%** atau **65,15%** dari target sebesar **1,98%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian "**Rendah**". Berdasarkan pergerakan PDRB dari tahun 2019 - 2022 masih di dominasi sektor pertambangan. Jika dilihat Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian tahun 2021 terhadap Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian tahun 2022 mengalami perlambatan sebesar **0,61%**.

Faktor Pendorong Keberhasilan :

- a. Adanya produk IKM yang pemasarannya sampai keluar Kabupaten
- b. Tersedianya bahan baku untuk menunjang proses produksi

Permasalahan/ Hambatan :

Sektor perindustrian di Balangan di dominasi oleh Industri Kecil yang mana juga merupakan usaha sampingan masyarakat, sehingga

kurang berpengaruh atau kurang berperan terhadap peningkatan PDRB.

Indikator	2021	2022		Capaian 2022 terhadap 2021	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	90,16	6,30	3,84**	60,95	57,31
Rata-rata Capaian				60,95	
				Rendah	

Catatan :

** : Angka rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa tersebut adalah sebesar 3,84% atau 60,95% dari target sebesar 6,30%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian "**Rendah**". Jika dilihat Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa tahun 2021 terhadap Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa tahun 2022 mengalami perlambatan sebesar 1,66%.

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah penurunan masa manfaat pada kendaraan dinas operasional kepala SKPD yaitu mobil operasional pembelian tahun 2013 serta tidak adanya mobil operasional pejabat (sekretaris) dan mobil operasional umum sebagai sarana transportasi penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan antara lain, koordinasi, konsultasi dan pengumpulan data, penyuluhan, pembinaan, evaluasi serta monitoring, mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2022, telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan perindustrian dan urusan pemerintahan perdagangan ada yang telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra telah tercapai, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Balangan selalu mengalami kenaikan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dirasakan berdampak langsung bagi UMKM dan IKM melalui pemberian bantuan alat usaha, fasilitasi pelatihan pemasaran produk melalui IT (e-commerce), fasilitasi IKM mengikuti pelatihan teknis produksi, fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk, yang efeknya diharapkan terjadi peningkatan penjualan yang semakin baik. Meningkatnya produk perdagangan yang aman, meningkatnya kualitas alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera serta meningkatnya tatakelola pasar dirasakan langsung juga oleh konsumen. Untuk lebih jelas terkait rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Persentase Koperasi Berpredikat Sehat (%)					8.45										8.45	8.45			
Persentase Usaha Mikro Naik Kelas (%)			0.15	0.15	0.16		0.15	0.15	0.16	0.18					0.16	0.18			
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	5.97	5.50	3.84	6.40	6.50					6.40	6.50			
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	1.98	1.90	1.29	1.99	2.00					1.99	2.00			
Persentase Koperasi Berkualitas (%)					7.04					50					7.04	50			
Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat (%)			25.74	25.77	25.79		25.74	25.77	25.79	25.81					25.74	25.77	25.79	25.81	

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Rp	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp		11
1	2	3																	12
Kompetensi Usaha (%)																			
Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan E-Commerce (%)			0.14	0.14	0.15					0.14	0.14	0.14	0.15	0.17					
Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah (%)			2.53	0.53	4.38					2.53	0.53	4.38	0.56						
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)																			10.00
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)					30.00														30.00
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)																			7.88

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)			8.42	9.84	12.00	4.80	8.42	9.84	12.00	15.15		
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)										100		
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang			7.85	6.10	7.60	8.08	7.85	6.10	7.60	7.40		

Indikator	SPM/Standar Nasional		IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis
	Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
	Rp			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Kebutuhan Pokok (%)																			
Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)	61.53	69.23	61.53	61.53	61.53	46.15	61.53	61.53	69.23	61.53	69.23	61.53	69.23	61.53	69.23	69.23			
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)																			
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)	6.81	10		6.81	10	12	4.10	6.81	10	12	13.00	20.83	25.00	12	13.00	13.00			
Persentase Pertumbuhan IKM (%)	5.81	1.36		5.81	1.36	1.68	5.81	-9.20	1.36	1.68	1.98	1.68	1.98	1.68	1.98	1.98			
Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang (%)	0.13	0.42		0.13	0.42	0.58		0.13	0.42	0.58	1.58	0.58	1.58	0.58	1.58	1.58			

Untuk bidang koperasi dan Usaha mikro selama tahun 2022 menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan hasil-hasil yang dicapai diantaranya melaksanakan pembinaan dan monitoring koperasi dengan kegiatan melakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terhadap 7 (tujuh) buah koperasi, yaitu :

No	Nama Koperasi	Alamat	Pemeriksaan Kesehatan Tahun Buku 2021	
			Kategori	Nilai
1	KPRI Sejahtera Mandiri	Kel. Batu Piring	Sehat	80,18
2	KSU Raga Bersama	Desa Lok Batu	Cukup Sehat	76,26
3	KUD Sido Mukti	Desa Sumber Rezeki	Dalam Pengawasan	65,68
4	PRIMKOPOL Balangan	Harapan Baru Kel. Batu Piring	Cukup Sehat	70,77
5	KPN Balangan	Paringin Kota	Sehat	93,39
6	KSU Kartika Jaya	Paringin Timur	Cukup Sehat	76,82
7	KSU Pulawanin Makmur Sejahtera	Desa Inan	Sehat	80,88

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan koperasi baik manajemennya ataupun keuangannya. Kegiatan ini sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja SKPD.

Disamping itu, melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di Kabupaten Balangan terdapat sebanyak 23 buah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2022 dimana terdapat 13 (tiga belas) buah koperasi atau sebesar 56,52% yang labanya meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah koperasi di Kabupaten Balangan sebanyak 112 buah yang terdiri dari 71 buah koperasi aktif dan 41 buah koperasi tidak aktif. Dengan demikian prosentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terhadap koperasi aktif sebesar 32,39% dan sebesar 20,53% terhadap seluruh jumlah koperasi yang ada.

Tahun 2022, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta

kapasitas dan kompetensi SDM koperasi terhadap 85 orang peserta kegiatan ini bersumber tidak hanya dari APBD tetapi juga didukung oleh APBN melalui DAK Non Fisik. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan bagi pelaku UKM, pada tahun 2022 dilaksanakan Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Desain dan Pengemasan Produk Bagi Usaha Mikro yang diikuti oleh peserta sebanyak 60 pelaku UMKM yang ada tersebar di Kabupaten Balangan yang juga bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.

Selain itu pada tahun 2022 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro melalui sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi telah melaksanakan dan menyalurkan hibah bantuan alat usaha kepala pelaku usaha mikro. Kegiatan ini dalam rangka mendukung dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masa pasca covid-19 atau masa endemi covid-19 di Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk terus adanya program/kegiatan nyata untuk membantu para pelaku usaha mikro, yakni pemberian hibah bantuan alat usaha. Dengan keberadaan fasilitas alat usaha tersebut tersebut diharapkan mampu meningkatkan omzet para pelaku usaha mikro. Maksud dari pemberian hibah bantuan ini adalah untuk membantu pengembangan dan peningkatan fasilitas usaha mikro di Kabupaten Balangan. Sasaran pemberian hibah bantuan alat usaha ini adalah diperuntukkan untuk 70 pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Balangan.

Untuk bidang saran dan pengembangan perdagangan tahun 2022 melakukan pembangunan/rehab/perbaikan pasar melalui program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan RI telah melakukan pembangunan/rehab/perbaikan sebanyak 6 (enam) buah pasar/sarana prasarana perdagangan antara lain :

1. Pasar Batumandi meliputi paving halaman depan dan paving depan pasar karet.
2. Pasar Adaro meliputi pembuatan blok pasar ikan belakang pasar adaro dan perbaikan paving samping.
3. Pasar Awayan.
4. Pujasera.

5. Eks Pasar Uyam meliputi penghapusan aset bangunan pasar dan paving blok halaman dan wc.
6. Pembangunan Pasar Uren.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar, mengingat pasar merupakan sentra perdagangan yang ada di Kabupaten Balangan.

Untuk bidang standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan tahun 2022 pada seksi perizinan dan pendaftaran perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha se-Kabupaten Balangan sebanyak 50 pelaku usaha pada tahun 2022, jumlah total rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan sebanyak 1085 buah. Seksi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting telah melaksanakan kegiatan pasar murah di tahun 2022 sebanyak 38 kali yang telah dilaksanakan di desa-desa dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan serta telah melaksanakan kegiatan pemantauan harga barang pokok dan barang penting baik harian dan mingguan sebanyak 54 kali, adapun kegiatan dilaksanakan di Pasar Modern Adaro, Pasar Tradisional Batumandi, Pasar Bihara Kecamatan Awayan dan Pasar Tabuan Kecamatan Halong. Terakhir pada seksi standardisasi dan perlindungan konsumen telah melaksanakan Tera/Tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yaitu :

- a. Pompa Ukur BBM SPBU sebanyak 34 buah Nozzle di 3 SPBU yang ada di Kabupaten Balangan dengan jumlah retribusi Rp.1.450.000,-
- b. UTTP pasar di tahun 2022 dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

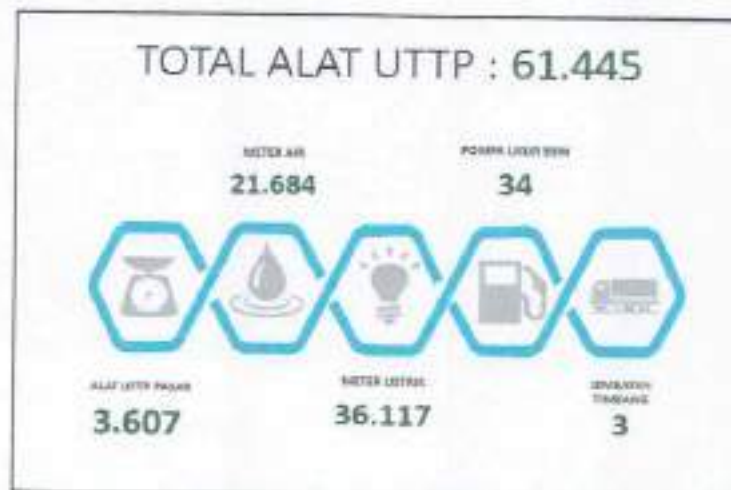
No	Kecamatan	Jumlah Pemilik UTTP	Jumlah Pemilik UTTP yang Melakukan Tera/Tera Ulang
1	Paringin dan Paringin Selatan	429	205
2	Batumandi	144	63
3	Lampihong	139	49
4	Juai	49	25
5	Awayan	283	40
6	Halong	329	21

7	Tebing Tinggi	30	-
TOTAL		1.403	423

dengan total retribusi sebesar Rp. 3.387.500,-

- c. Timbangan jembatan sebanyak 3 unit dengan total retribusi sebesar Rp. 1.740.000,-

Pada kegiatan pengawasan Metrologi Legal/Keamanan Pangan telah dilaksanakan kegiatan Metrologi Legal/Keamanan Pangan di Pasar Batumandi dan Pasar Paringin. Sebanyak 27 toko/kios yang dilakukan pengawasan di dapatkan hasil temuan sebanyak 88 jenis barang tidak layak edar atau 188 buah jumlah barang dari 362 sampel. Untuk kegiatan pendataan UTTP yang dilaksanakan didapatkan hasil pendataan sebagai berikut :



Untuk bidang perindustrian tahun 2022 telah melakukan pendataan terhadap industri kecil dan menengah pada beberapa kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 2.589 IKM. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melalui bidang perindustrian juga melakukan fasilitasi/pendampingan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Balangan antara lain memfasilitasi sertifikasi halal kepada 29 (Dua puluh sembilan) IKM pangan yang ada di Kabupaten Balangan, diantaranya :

No	Nama Usaha	Pemilik Usaha	Keterangan
1	Alfina	Alfianor	APBD Kabupaten
2	Acil Hadar	Hindun	APBD Kabupaten
3	Bunda	Siti Nurjannatunaim	APBD Kabupaten
4	Dua Ahsan	Disriati Pazriah	Fasilitasi Self Declare
5	CBA	Armaniah	Fasilitasi Self Declare

No	Nama Usaha	Pemilik Usaha	Keterangan
6	Jamu Umami Norjannah	Abdullah	Fasilitasi Self Declare
7	Acil Aluh	Rusmiati	Fasilitasi Self Declare
8	Adam Al Shirazy	Asni Fajri	Fasilitasi Self Declare
9	Dua Lengan	Muhammad Ridno	Fasilitasi Self Declare
10	Raisa Cake's	Riska	Fasilitasi Self Declare
11	Hayara	Siti Kamariah	Fasilitasi Self Declare
12	Do'a Ibu	Muliadi	Fasilitasi Self Declare
13	Anika Manisan Mafis	Rusmawati	Fasilitasi Self Declare
14	Rorompok Bahenol	Titin Wartini	Fasilitasi Self Declare
15	Mama Fida	Masdia	Fasilitasi Self Declare
16	An Nabil	Nor Asiah	Fasilitasi Self Declare
17	An Niam Barokah	Agustina	Fasilitasi Self Declare
18	Audina Helda Yani	Helda Yani	Fasilitasi Self Declare
19	Chang Wang	Ernawati	Fasilitasi Self Declare
20	Sirasa	Iswati Marfuah	Fasilitasi Self Declare
21	Lisa	Lisa	Fasilitasi Self Declare
22	Kaganangan	Marlina	Fasilitasi Self Declare
23	Tiga Badangsanak	Masramia	Fasilitasi Self Declare
24	Ucadas Mama Aisyah	Riska Vidilawati	Fasilitasi Self Declare
25	Asyifa	Rohida	Fasilitasi Self Declare
26	Umi Afika	Salmah	Fasilitasi Self Declare
27	Maju Bersama	Ratna Indah Sari	Fasilitasi Self Declare
28	Vita Zafira	Pariyem	Fasilitasi Provinsi
29	Snack Fadillah	Ety Mariati	Fasilitasi Provinsi

Dengan adanya label halal diharapkan produk tersebut dapat dengan mudah masuk ke pasaran, baik pasar lokal maupun luar. Selain itu konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal. Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya untuk konsumen muslim saja tetapi juga konsumen non-muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya, karena halal tidak saja berarti kandungannya yang halal, namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Sertifikat halal juga membuka peluang ekspor yang luas kepada suatu produk, serta memiliki keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan pangan lainnya.

Bidang Perindustrian telah melakukan beberapa pelatihan maupun magang kepada para IKM antara lain :

1. Pelatihan Teknis Pengembangan Model Dan Desain Anyaman diselenggarakan oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan bertempat di Nafiza Collection Banjarbaru dan diikuti oleh 8 (delapan) orang IKM

2. Pelatihan Pembuatan Kain Sasirangan diselenggarakan oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan bertempat di kantor DKUKMPP, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan dan diikuti oleh 8 (delapan) orang IKM.
3. Pelatihan Servis Elektronik (Servis Printer) diselenggarakan oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan bertempat di Haur Batu, Kelurahan Paringin Kecamatan Paringin dan diikuti oleh 8 (delapan) orang IKM
4. Pelatihan Pengolahan Ikan Air Tawar (Ikan Sungai) Menjadi Produk Albumin dan Diversifikasinya Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Banjarbaru. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 1 (satu) orang IKM
5. Pelatihan Pengolahan Ikan Air Tawar (Ikan Sungai) Menjadi Produk Albumin dan Diversifikasinya Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Banjarbaru. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 1 (satu) orang IKM
6. Pelatihan Adaptasi Produk Ekspor Berbasis Purun, Bambu dan Tirik Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Banjarbaru. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 3 (tiga) orang IKM
7. Pelatihan Pendampingan Pembuatan Mesin Pompa Axial diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Nagara, Hulu Sungai Selatan. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 3 (tiga) orang IKM
8. Pelatihan Pendampingan Pembuatan Kitchen Set Berbahan HPL diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Hulu Sungai Utara. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 2 (dua) orang IKM
9. Pelatihan Pendampingan Pembuatan Mesin Power Tressher Bagi Pelaku Usaha Perbengkelan Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Nagara, Hulu

Sungai Selatan. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 3 (tiga) orang IKM

10. Pelatihan GMP Bagi SDM Industri Pangan Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Banjarbaru. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 2 (dua) orang IKM
11. Bimtek Pelatihan Anyaman Sebagai Pendukung Fashion Se Kalsel diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Banjarmasin. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 4 (empat) orang IKM
12. Pelatihan Pendampingan Pembuatan Prototipe Lemari Kaca Berbasis Aluminium diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Hulu Sungai Utara. Peserta dari Kabupaten Balangan yang berpartisipasi 1 (satu) orang IKM

Secara umum saat ini baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga tahun ketiga perencanaan rencana kerja (Renja) SKPD dihadapkan pada rendahnya daya saing dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, akibatnya pengembangan produk, khususnya produk pangan masih rendah dan juga desain kemasan produk masih belum berorientasi pada pasar. Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama bagi UKM/IKM yang ada di Kabupaten Balangan, ditambah lagi oleh kurangnya akses permodalan. Pada umumnya modal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan usaha produksi.

Pelaku usaha sendiri di tahun mendatang akan dihadapkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, pelaku usaha harus tetap bangkit dan terus memproduksi. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terus berupaya melakukan pembinaan dan pelatihan, fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga kepada UKM dan IKM. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran, misalnya untuk mengenalkan produk-produk yang dihasilkan. Melalui fasilitasi promosi dan pameran, pelaku usaha baik UKM dan IKM secara tidak langsung diajak untuk melihat produk-produk dari luar, tujuan utamanya adalah

mengharapkan pelaku usaha bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan guna sebagai pengembangan produk yang dihasilkan saat ini, Keberpihakan pemerintah daerah dimulai dari dikeluarkannya surat edaran Bupati Balangan nomor : 518.3/104/DKUKMPP-BLG/2021 tentang Prioritas Pembelian/Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Balangan. Dengan tujuan agar belanja pemerintah daerah lebih mengutamakan menggunakan produk lokal yang ada di Kabupaten Balangan, usaha ini diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, sehingga produk yang dihasilkan/diproduksi baik oleh UKM dan IKM mampu masuk pasar dalam negeri.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2022 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk mewujudkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2022 antara lain :

1. Pendataan pelaku industri/usaha mikro yang dilakukan dengan metode manual menyebabkan penyajian hasil pendataan/pemetaan terhadap pelaku industri/usaha mikro sebagai bahan informasi untuk pertumbuhan wirausaha baru memakan waktu lama.
2. Masih kurangnya produk lokal yang mampu bersaing dipasar global antara lain karena kemasan serta ketersediaan bahan baku yang kadang sulit didapat dalam jumlah banyak untuk waktu yang singkat, sehingga membuat investor cenderung ragu untuk berinvestasi. Selain itu masih kurangnya promosi-promosi terhadap produk unggulan

membuat produk unggulan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat maupun calon investor.

3. Masih kurangnya bantuan dana dari pemerintah sebagai upaya untuk pengembangan modal/usaha koperasi sehingga usaha yang dijalankan oleh koperasi sering sulit untuk berkembang yang berakibat pada tingginya jumlah koperasi tidak aktif selain karena lemahnya semangat wirausaha dari masyarakat, koperasi serta usaha mikro itu sendiri.
4. Masih rendahnya sumber daya aparatur yang memahami sepenuhnya terhadap rencana kerja kegiatan sehingga mempersulit dalam melakukan pengukuran kinerja
5. Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan rehab pasar yang dirasa masih kurang sehingga pasar masih terkesan kumuh.

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan dan pemetaan terhadap pelaku industri/usaha mikro secara online dan menggunakan sistem basis data sebagai informasi untuk program pertumbuhan wirausaha baru ke depan.
2. Perlunya pengembangan dan pemasaran terhadap produk unggulan daerah. Dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (industry kecil menengah dan usaha mikro) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Perlunya partisipasi kemitraan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuan permodalan koperasi dan usaha mikro.
4. Meningkatkan kinerja koperasi agar mampu bersaing dengan perbankan.
5. Perlunya pelatihan dan bimbingan untuk semua aparatur agar lebih memahami dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
6. Mengupayakan usulan anggaran dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk pemeliharaan dan rehab pasar.

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimana peningkatan dan perluasan akses permodalan, perluasan dan penguatan akses pemasaran koperasi dan UMKM, pengembangan keanggotaan

koperasi dan UMKM, menyelenggarakan pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi, fasilitasi sertifikasi halal dan merek, fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, revitalisasi sarana prasarana perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar, perlindungan konsumen menjadi fokus kami untuk dilaksanakan ditahun mendatang.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan usaha mikro
2. Penerapan dan penguasaan teknologi masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan biaya produksi menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas.
3. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM dan belum adanya sistem informasi dan database pelaku industri/usaha mikro yang akurat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global.
2. Legalitas dan peluang usaha koperasi, dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh koperasi dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar dan pelatihan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi dan usaha mikro dan perindustrian.
4. Perlunya penguatan sistem aplikasi database perdagangan yang mendukung untuk pemasaran produk-produk perdagangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) pada tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal RKPD beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	MILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	8,167,579,499	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9	MILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	13	6,779,990,860
			PERSENTASE TERJANJAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100				PERSENTASE TERJANJAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100		
			MILAI IKM PERANGKAT DAERAH	88.30				MILAI IKM PERANGKAT DAERAH	88.30		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	32,080,600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		36,373,000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15,610,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	15,610,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi	5	16,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi	5	Laporan	20,763,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	6,462,915,646	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100		6,714,416,040

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1												
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6.337.068,700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 546 Orang/bulan	6.337.068,000	13	14
4	Pelaksanaan Perencanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	314.947,140	Pelaksanaan Perencanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	377.347,140		
III	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	73.850,000	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100 %	73.800,000		
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	73.950,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	73.950,000		
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100 %	813.771,260	Administrasi Umum perangkat daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100 %	905.191,200		
6	Penyediaan komponen insulasi listrik/energian bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen insulasi listrik/energian bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	17.668,600	Penyediaan komponen insulasi listrik/energian bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen insulasi listrik/energian bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	17.668,600		
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	53.351,100	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	148.811,100		
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	59.986,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	59.986,200		
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	56.707,600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	56.707,600		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	8.475,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	8.475,000		

Rencana Kerja (Revisi) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)							
1	11	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	617,542,700	8	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	12	Laporan	617,542,700	13
V		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	%	-		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	%			150,000,000
12		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	Unit			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14	Unit			150,000,000
VI		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	292,882,450		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%			292,882,450
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	157,189,150		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan			157,189,150
14		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	135,693,400		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan		Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan			135,693,400
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	303,269,900		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%			603,167,900
15		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan pemangkas dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	Unit	207,789,900		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan		Jumlah kendaraan pemangkas dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit			207,789,900

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keberhasilan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	34.270.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	34.270.000	
17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	61.200.000	
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	61.200.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Balangan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	200.800.000	
VIII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI AKTIF	64	%	112.099.300	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI AKTIF	64	%	112.099.300	
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi Taat Peraturan	30	%	112.099.300	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi Taat Peraturan	30	%	112.099.300	
19	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	6	Unit usaha	112.088.300	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	24	Unit usaha	112.088.300	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI	90.00	%	46.330.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI	90.00	%	46.330.000	
IX	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ kota		Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	22.32	%	46.330.000	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ kota		Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	25.00	%	46.330.000	

Rencana Kerja (Ranja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
1	20	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perseparasi Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan	Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perseparasi	40	Orang	48.330.000	Jumlah SDM Yang memahami Pengetahuan Perseparasi	11	12	Orang	48.330.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI USAHA MIKRO (UMKM)	70,00	%	553.510.000	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA	70,00	%		728.510.000
				PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENERAPKAN E-COMERCE	0,17	%		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENERAPKAN E-COMERCE	0,17	%		
X		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perijinan, penguatan ketebagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Persentase Koperasi yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro	1,80	%	553.510.000	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perijinan, penguatan ketebagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	0,36	%		728.510.000
				Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,90	%		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,90	%		
				Persentase Usaha Mikro yang Bermula	0,60	%		Persentase Usaha Mikro yang Bermula	0,17	%		
21		Pemberdayaan melalui pembinaan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan pembinaan usaha mikro	20	Unit usaha	194.400.000	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan pembinaan usaha mikro	20	Unit usaha		199.480.000
22		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pendampingan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha	78.100.000	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pendampingan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha		278.100.000
23		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Balangan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	11717	Unit usaha	280.930.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	11.717	Unit usaha		280.930.000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	2.67	%	407.430.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	2.67	%	1.745.830.000	
XI	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Perentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat	0.83	%	407.430.000	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Perentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat	2.94	%	1.745.830.000	
24	Produk dan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Balangan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	91	Unit usaha	407.430.000	Produk dan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Balangan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	321	Unit usaha	1.745.830.000	
	PROGRAM PERZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	15.15	%	110.750.000	PROGRAM PERZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	15.15	%	110.750.000	
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKUKAN (%)	0	%				PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKUKAN (%)	0	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Carakan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pago Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
XII	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Balangan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	50	Buah	75.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Balangan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	50	Buah	75.000.000	
25	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	75.000.000	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	75.000.000	
XIII	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Pemertama Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri	Kab. Balangan	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	9	Buah	41.150.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Pemertama Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri	Kab. Balangan	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	9	Buah	41.150.000	
26	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	41.150.000	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Dokumentasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	41.150.000	
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10,00	%	2.134.445.200	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10,00	%	13.654.872.700	
XIV				83,33	%					83,33	%		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	5	6	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	10	11	12		Kebutuhan Dana (Rp.)	13
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	Persentase Pasar yang direvitalisasi	5	6	7	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8	0	10	11	12	13	14	
27	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	unit	2.003.245.800	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit		13.523.673.350		
28	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1.283.805.200	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit		12.224.438.100		
XV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	60	%	131.189.400	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			60	%		131.189.400		
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65.599.700	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen		65.599.700		
30	Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65.599.700	Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen		65.599.700		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DALAM JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7,40	%	372.711.400	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			7,40	%		757.218.200		
XVI	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66	Kali	372.711.400	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			66	Kali		757.218.200		
			Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	23	Kali					23	Kali				

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemukiman dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1				5	6	7			11	12	13	14
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	111.576.700	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	126.576.700	
32	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	251.134.700	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	630.842.500	
XVII	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	50	%	1.073.884.500	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		50	%	1.073.884.500	
				33	%	1.073.884.500	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		33,33	%	1.073.884.500	
33	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang diwakili dalam pameran dagang	15	Pelaku usaha	1.822.384.500	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang diwakili dalam pameran dagang	Pelaku usaha	1.822.384.500	
34	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diwakili dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	Pelaku usaha	51.600.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diwakili dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	51.600.000	
XVIII	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Balangan	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL Nilai Transaksi Promosi Perdagangan	7,88	%	50.600.000	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		7,88	%	50.600.000	
					Rp	50.600.000			1.288.000,00	Rp	50.600.000	

Rencana Kerja (Ranja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Keseluruhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
35	Pemetaan dan Peningkatan Pergerakan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas	80	%	50.600.000	Pemetaan dan Peningkatan Pergerakan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	20	UMKM	50.600.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah UMKM yang melakukan pemetaan produk dalam negeri melalui kontraksi dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20	UMKM				20	UMKM		
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	89,23	%	137.379.800	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		69,23	%	478.638.266	
			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25,00	%				25,00	%		
XIX	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah SDM Kometrologian yang memperoleh sertifikasi teknis	1	Orang	137.379.800	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		1	Orang	578.539.200	
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	1300	Buah				1300	Buah		
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	150	Buah				150	Buah		
36	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat baker, alat timbangan, dan alat perlengkapan di era digital	1300	Unit	65.251.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	1300	Unit	486.010.700	

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
37	Pengawasan/ Penyelidikan Meletri Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang meletri legal yang dibare	50 Orang	72.128.500	Pengawasan/ Penyelidikan Meletri Legal	Kab. Balangan	Jumlah pebaku usaha dibidang meletri legal yang dibare	11 50 Orang	13 92.628.500	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	13,00 %	939.336.100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	13,00 %	3.937.611.600	
XX	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikat Sesuai Kebutuhan	30 IKM	939.336.100	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikat Sesuai Kebutuhan	5 IKM	3.937.611.600	
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peman Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	9 IKM		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peman Serta Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325 IKM		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1,38 %	939.336.100	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	1,38 %	3.937.611.800	
XXI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin	3 IKM	75.530.600	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		Jumlah IKM yang Memiliki Izin	82 IKM	75.530.600	
	Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIRNAS)					Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIRNAS)					

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
39	<p>3 Fasilitas verifikasi permohonan penyertaan/bandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemertiban perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>	3 Kab. Balangan	4 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi permohonan penyertaan/bandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah-Monopoli, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 1 Dokumen	6 75.530.600	7 Fasilitas verifikasi permohonan penyertaan/bandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemertiban perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) yang terintegrasi dengan Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	8 Kab. Balangan	9 10 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi permohonan penyertaan/bandar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah-Monopoli, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	11 12 Dokumen	13 75.530.600	14			
XXII	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</p> <p>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUKI, IUKL, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>15 PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG</p> <p>16 Nilai Pemasaran Produk IKM</p> <p>17 Jumlah Produk IKM Bersertifikasi</p>	18 1,58	19 1.026.000.400	<p>20 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</p> <p>21 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUKI, IUKL, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>22 PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG</p> <p>23 Nilai Pemasaran Produk IKM</p> <p>24 Jumlah Produk IKM Bersertifikasi</p>	25 1,58	26 1.026.000.400	27 1.026.000.400	28 Rp IKM	29 1.026.000.400	30 Rp IKM
	40	<p>Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lengkap Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)</p>	40 Kab. Balangan	<p>31 Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lengkap Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)</p>	32 1 Dokumen	33 148.400.000	<p>34 Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lengkap Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)</p>	35 Kab. Balangan	36 37 Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lengkap Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	38 1 Dokumen	39 148.400.000			

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
41	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIMAS Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen gasal Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIMAS Kabupaten/Kota	1 Dokumen	879.800.400	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIMAS Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen gasal Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIMAS Kabupaten/Kota	1 Dokumen	809.900.400	14
JUMLAH PAGU INDIKATIF					15.414.096.490	JUMLAH PAGU INDIKATIF					33.813.068.190



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat dimana usulan-usulan Program dan Kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait dengan usulan yang bersumber dari sektor atau bidang Sosial Ekonomi biasanya meliputi usulan mengenai pemberdayaan masyarakat, perkuatan modal, pembinaan pelaku usaha dan bantuan peralatan usaha bagi pelaku usaha.

Semua usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan usulan dari pokok pikiran (Pokir) pihak legislatif/DPRD akan diverifikasi dan apabila sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan atau apabila memungkinkan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan dana yang ada akan diakomodir pada program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagai berikut :



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Secara garis besar ada empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian mempunyai target kinerja pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM industri dengan beberapa indikator seperti tersedianya SDM aparatur yang kompeten, terselenggaranya pelatihan industri berbasis spesifikasi dan kompetensi, terfasilitasinya pengembangan SDM industri serta penguatan infrastruktur kelembagaan. Sedangkan target kinerja pembangunan pada kementerian Koperasi dan UKM diprioritaskan pada peningkatan peran usaha mikro dan kecil dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan, dengan indikator, peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM, perluasan dan penguatan akses pemasaran bagi koperasi dan UMKM serta perluasan KUR melalui program peningkatan daya saing UMKM. Selain itu pengembangan keanggotaan koperasi melalui penyuluhan dan kaderisasi melalui program penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam rangka sinkronisasi program antara program nasional dengan program daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan renja tahun 2023 ini dengan memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

2. Penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran.
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
4. Penempatan/Penyertaan Modal Negara/Daerah dalam rangka mendukung program KUR.
5. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD pada tahun 2023 adalah perkuatan permodalan/aset Koperasi, fasilitasi pembentukan koperasi dan pengembangan UMKM, pembinaan serta pendampingan IKM, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha serta optimalisasi kualitas produk unggulan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam pendapatan nasional. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dll. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya sektor perdagangan. Kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor-impor, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar rakyat, pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan umkm dan petani dibidang perdagangan.

Dalam rangka pencapaian iklim usaha yang kondusif dan terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha kedepan diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi didalam negeri. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki.

Sesuai dengan tupoksi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan. Selain itu Kementerian Perdagangan sebagai pembina sektor juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan peizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2023 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2023 adalah pembinaan atau penertiban alat ukur, pengawasan peredaran barang dan jasa, pengembangan pasar daerah/tradisional, penataan PKL dan Asongan, perbaikan sarana dan prasarana pendukung pasar dan membantu pemasaran produk-produk perdagangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan penggunaan produk lokal serta pengembangan usaha.

4. Meningkatkan daya saing produk lokal serta menumbuh kembangkan wirausaha baru.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan
6. Meningkatkan retribusi daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran tersebut diupayakan dalam rangka salah satu pencapaian sasaran Kabupaten Balangan yaitu Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa.

3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan ditahun 2024 adalah program-program yang menunjang capaian RPJMD yaitu Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, Program pendidikan dan latihan perkoperasian, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), Program pengembangan UMKM, Program perizinan dan pendaftaran perusahaan, Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program pengembangan ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program standardisasi dan perlindungan konsumen, Program perencanaan dan pembangunan industri, Program pengendalian izin usaha industri dan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Jika sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi dari target masing-masing program tersebut masih belum tercapai/kurang, maka rumusan program dan kegiatan ditahun 2025 akan lebih difokuskan dalam rangka pencapaian target program tersebut ditahun mendatang. Penyusunan program dan kegiatan juga megacu kepada program dan kegiatan prioritas yang telah termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

Kode Rukening	Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif		TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		78.20	8,779,960,650		80.4	9,690,025,549	
		PERSENTASE TEBUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI		100			100		
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MILAI IKM PERANGKAT DAERAH		88.30			90		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		100					
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2	Dokumen		2	Dokumen	17,175,000
2.17.01.2.01.0006	Kunjungan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Balangan	5	Laporan		5	Laporan	22,839,300
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		100	%		100	%	7,385,857,644
2.17.01.2.02.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	565	Orang/bulan		565	Orang/bulan	6,970,775,790
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengembalian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengembalian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	12	Dokumen		12	Dokumen	415,081,854
2.17.01.2.06	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		100	%		100	%	170,000,000

Kode Rekening	Uraian Penerimaan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Pening	Praktikum Wajar Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.17.01.2.05.0011	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	5	73.900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		17	Orang	170.000,000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik		100	999,191,200			100	%	999,710,370
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/peralatan lingkungan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peralatan lingkungan kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	17.698,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Paket	19,405,460
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Balangan	2	140,011,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5	Paket	159,292,210
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	59,806,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Paket	65,984,620
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan barang cakram dan pengancaman	Jumlah paket barang cakram dan pengancaman yang disediakan	Kab. Balangan	2	56,707,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Paket	62,379,360
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan bahan barisan dan peralatan pendukung-undangan	Jumlah Dokumen bahan barisan dan peraturan pendukung-undangan yang disediakan	Kab. Balangan	3	6,475,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3	Dokumen	9,302,500
2.17.01.2.06.0009	Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	1	617,542,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Laporan	679,296,870
2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	150,000,000			100	%	150,000,000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	14	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14	Unit	150,000,000

Rencana Kerja (Ranjo) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Praktoran Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/ Page Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/ Page Indikatif
2.17.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik		100 %	292,882,350			100 %	322,179,805
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Balangan	1	157,199,150	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Laporan 172,319,065
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	135,683,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Laporan 149,261,740
2.17.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik		100 %	663,167,900			100 %	626,276,896
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perantara dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perantara dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Balangan	50	207,799,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		55	Unit 226,379,890
2.17.01.2.08.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Balangan	92	34,270,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		97	Unit 37,697,000
2.17.01.2.08.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Balangan	1	61,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Unit 240,000,000
3.31.01.2.08.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Balangan	2	289,898,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Unit 120,000,000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF		64 %	112,069,300			65 %	162,245,200
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Koperasi Taut Peraturan		30 %	112,069,300			32 %	162,245,200

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikum Rujukan Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dasar/Pagu Invaluid			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dasar/Pagu Invaluid	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemantauan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemantauan dan Pengawasan	Kab. Balangan	24	112,089,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		25	Unit usaha	182,245,200
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI		90.00	46,330,000			90	%	60,000,000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Koperasi yang memperoleh Pendidikan dan Peasahan Perkoperasian		25.00	46,330,000			22	%	90,000,000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian Serta Koptasas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang memahami Penguasaan Perkoperasian	Kab. Balangan	40	46,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30	Orang	60,000,000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MEMENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMERAPKAN E-COMERCE		70.00	726,510,000			75	%	864,212,000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro		0.38	726,510,000			0.39	%	664,212,600
		Persentase Pertumbuhan Wirusaha Baru		3.90				4.16	%	
		Persentase Usaha Mikro yang Bermula		0.17				0.23	%	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui pembinaan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kontribusi usaha mikro	Kab. Balangan	20	160,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24	Unit usaha	203,379,000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelembagaan potensial dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan penguatan terhadap usaha mikro	Kab. Balangan	40	278,100,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40	Unit usaha	60,720,000

Kode Rekening	Urutan Peminjaman Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar	Kab. Balangan	11.717	290.930.000		11.067	337.116.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH		2.67	1,745,930,000		0.64	338,173,000
2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat		2.94	1,745,930,000		0.92	338,173,000
2.17.08.2.01.0008	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Balangan	321	1,745,930,000		100	338,173,000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN		15.16	116,750,000		18.42	128,425,600
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA		0			100	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitas Peminjaman Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen/ Peminjaman Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	59	75,800,000		70	83,160,600
3.30.02.2.01.0001	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri		1	75,800,000		1	83,160,000
3.30.02.2.01	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri		9	41,150,000		11	49,265,000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Unsur Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif
3.30.04.2.02.0001	Pemantuan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	Kab. Balangan	23			32	Kali
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	12	1.26.576,700		0	Laporan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1	630.642,500		1	Laporan
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR		80	1.973.994,600		70	%
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor		33.33	1.973.994,600		66.76	%
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat		5			10	Pelaku usaha
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam pameran dagang	Kab. Balangan	15	1.522.394,530		0	Pelaku usaha
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang Didaftarkan dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Balangan	4	51.900,000		5	Pelaku usaha
3.30.07.2.01.0000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL		7.80	50.500,000		37.5	%
		Nilai Transaksi Promosi Perdagangan		1.300.000,00	50.600,000		1.600.000,000	Rp
		Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas		33.33			37.50	%
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, platform dan jasa e-commerce	Kab. Balangan	20	50.600,000		0	UMKM

Rencana Kerja (Rencana) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Catatan PENDING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN		89.23 25.00	578.635,200		75.92 29.10	500.000,000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP) bertanda Tera Saha Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai kebutuhan		1 1300 190	678.639,200		2 1.490 180	800.000,000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan, dan alat perengkapannya lainnya ulang	Kab. Balangan	1300	468.010,700		1.400	300.000,000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/penyulthan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	Kab. Balangan	60	92.628,500		50	200.000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MEMERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI		13.00	3.937.811,600		14.00	200.000,000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki Sesuai Kebutuhan		5	3.937.811,600		5	200.000,000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemas Seta Masyarakat	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribus	Kab. Balangan	325 1			350 1	250.000,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN UZUR USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM		1.98	75.529,600		2.11	75.090.000

Kode Rekening	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kementerian Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Jumlah IKM yang memiliki Izin		0-2	75.530,600		1-26	75.000,000
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi permohonan persyaratan/ibander kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi permohonan persyaratan/ibander kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Balangan	1	75.530,600		1	75.000,000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG		1.58	1,065,900,466		2.08	1,270,000,000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUKI, IUKI, dan IPKI Kawasan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM Bersertifikasi		273.62	1,065,900,400		284.06	1,270,000,000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain terkait Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain terkait Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Kab. Balangan	1	148,400,000		1	170,000,000
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINAS Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINAS Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1	909,500,400		1	1,100,000,000
JUMLAH PAGU INDIKATIF					33.613.048,190			32,363,618,034

Palingti, 27 Juli 2023
Kepala/Direksi



H. RIBON, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19861101-199801 1 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.
3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian, Usaha UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

4.2 Analisa Sosial Ekonomi

Setelah dirumuskan pertimbangan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, penetapan 13 program prioritas dan 1 program penunjang yang dijabarkan kedalam 22 kegiatan dan 42 Sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, tentunya perlu dilakukan analisa sosial ekonomi.

Analisa dilakukan pada 3 urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Namun perkembangan perkoperasian dirasakan masih belum mencapai kondisi terbaiknya. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi, dimana setiap koperasi menghadapi permasalahannya masing-masing yang beragam dan berbeda dengan koperasi lainnya. Begitu juga dengan pengelolaan koperasi, masih banyak koperasi yang belum mampu mengelola manajemen perkoperasian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, dipandang perlu adanya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk kelembagaan koperasi, manajemen usaha ataupun manajemen operasional koperasi. Pemerintah memberikan akses yang luas kepada Koperasi untuk mengembangkan usahanya. Namun koperasi juga diberi batasan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Koperasi. Kesemua itu dimaksudkan agar Koperasi benar-benar dapat membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan perkoperasian bagi para pegiat koperasi sehingga kapasitas dan kemampuan SDM Koperasi dapat ditingkatkan. Saat ini, kualitas kinerja kelembagaan koperasi dinilai masih rendah. Disamping itu, regenerasi kepengurusan koperasi juga perlu disiapkan sebagai upaya menghadapi pergantian pengurus yang habis masa kepengurusannya. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memberikan kesempatan bagi SDM Koperasi untuk dapat menimba ilmu perkoperasian baik yang menyangkut pengelolaan manajemen usaha, keuangan ataupun operasional koperasi lainnya. Pengelolaan koperasi harus sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan perkoperasian dan turunannya.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Guna meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan, ketersediaan data pelaku UMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang akurat, lengkap dan dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu strategi pemberdayaan usaha mikro yaitu melalui kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai leading sector dalam pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengelola basis data bagi UMKM. Untuk mewujudkan Database UMKM tersebut, perlu ada dilakukan kegiatan pendataan UMKM dan bertanggungjawab memberikan fasilitasi kemitraan usaha supaya UMKM lokal lebih maju dan berkembang.

d. Program Pengembangan UMKM

Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM melalui pemberian fasilitasi, bimbingan dan

pendampingan. Dengan pemberian fasilitasi baik dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi maka UMKM berpotensi untuk dapat lebih meningkatkan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan untuk lebih meningkatkan perekonomian.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya :

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses

hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah agar dapat masuk retail-retail modern guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) dengan retail modern.

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

3. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain
- Pengendalian Izin Usaha Industri melalui pendaftaran merek gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pendaftaran merek gratis kepada IKM. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau Startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi

pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Merek berfungsi untuk menjamin asal barang atau jasa. Sehingga, fungsi tersebut berkontribusi pada transparansi pasar yang menguntungkan konsumen dan pelaku usaha. Suatu usaha harus dilindungi terhadap pesaing tidak sehat yang menginginkan barang atau jasanya menyamar sebagai barang atau jasa usaha orang lain.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan

ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

4.3 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak total 14 program, 22 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Program prioritas dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 33.613.968.190,00,-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode Kegiatan	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	%				TARGET CAPAIAN KINERJA	%
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI		78,20	%	8.779.980,890			80,4	%
				100	%				100	%
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH		88,30					90	
2.17.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	30.373.000			100	%
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2	Dokumen	15.610.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2	Dokumen
2.17.01.2.01.0006	Keselamatan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas realisasi kinerja SKPD	Kab. Balangan	5	Laporan	20.703.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5	Laporan
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		100	%	6.714.416,040			100	%
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	548	Orang/bulan	6.337.068,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		548	Orang/bulan
2.17.01.2.02.0003	Polikamisan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	12	Dokumen	377.347.140	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12	Dokumen
2.17.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Perentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		100	%	73.966.000			100	%

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Praktis Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kelembahan Dana/ Paga Indikator			Target Capaian Kinerja	Kebijakan
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	5 Orang	73.980.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		17 Orang	170.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik		100 %	905.191.200			100 %	995.710.320
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	17.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	19.435.480
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Balangan	2 Paket	148.811.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Paket	159.252.210
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1 Paket	59.986.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Paket	66.664.820
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan barang olahraga dan pengadaan	Jumlah paket barang olahraga dan pengadaan yang disediakan	Kab. Balangan	2 Paket	55.707.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Paket	62.379.360
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen telah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Balangan	3 Dokumen	8.475.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	9.322.500
2.17.01.2.06.0009	Pengembangan sistem koordinasi dan komunikasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	Kab. Balangan	1 Laporan	617.542.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	679.288.970
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		100 %	150.000.000			100 %	150.000.000
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Balangan	14 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Unit	150.000.000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Usahan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Pikiran Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator			TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
2.17.01.2.06	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik		100 %	262,462,550			100 %	322,170,805
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Balangan	1	167,199,150	Dana Transfer Umum - Dana		1	Laporan
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Balangan	1	135,683,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	laporan
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik		100 %	803,167,900			100 %	626,276,890
2.17.01.2.09.0001	Pemeliharaan dan peeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perantara dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Balangan	50	207,799,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		55	Unit
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Balangan	92	34,270,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		97	Unit
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Balangan	1	61,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Unit
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Balangan	2	398,868,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1	Unit
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF		64 %	112,099,360			65 %	182,245,200
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam, simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Taat Peredaran		30 %	112,099,360			32 %	182,245,200

Kode Rkening	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Damar Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Damar Pagu Indikatif	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemecatan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi yang telah dibuktikan Pemecatan dan Pengawasan	Kab. Balangan	24	Unit usaha	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		25	Unit usaha	162,245,200
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI		99.00	%	46,330,000		90	%	60,000,000
2.17.06.2.01	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Menopionien Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		25.00	%	46,330,000		22	%	60,000,000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Yang memahami Penguasaan Perkoperasian	Kab. Balangan	40	Orang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30	Orang	80,000,000
2.17.07	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA, MENINGKAT, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA YANG MENERAPKAN E-COMERCE		76.00	%	728,510,000		76	%	664,212,000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, kemudahan perijinan, penguatan keanggotaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro		0.17	%			0.20	%	
		Persentase Pertumbuhan Usaha Baru		0.38	%	728,510,000		0.39	%	664,212,000
		Persentase Usaha Mikro yang Bermitra		3.00	%			4.10	%	
		Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kerjasama usaha mikro		0.17	%			0.23	%	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kerjasama usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kerjasama usaha mikro	Kab. Balangan	20	Unit usaha	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		24	Unit usaha	233,375,000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelompok/badan usaha dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pendanaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kab. Balangan	40	Unit usaha	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40	Unit usaha	93,720,000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Unsur Pemenuhan Dasar dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prabaraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.07.2.01.001.4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terbata	Kab. Balangan	11.777	280.930.000		11.867	337.116.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH		2.67	1.745.930.000		0.84	338.173.000
2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkatkan		2.94	1.745.930.000		0.82	338.173.000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Balangan	321	1.745.930.000		100	338.173.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)		15.15	116.750.000		18.42	129.425.000
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan		0			100	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Keinginan Perbaikan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Keinginan Perbaikan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	50	75.660.000		70	83.160.000
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri		1	41.150.000		11	45.265.000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Puktiran Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar/Pagu Indikator		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar/Pagu Indikator
3.30.02.2.03.0001	Untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Layanan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Tertegasi secara Elektronik	Kab. Balangan	9	Dokumen	11	Dokumen	45,265,000
3.30.03	PEMUNGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR		10,00	%	10	%	18,098,232,970
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi		83,33	%	91,67	%	18,548,873,306
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	7	unit	4	unit	17,224,438,100
3.30.03.2.01.0002	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	10	unit	11	unit	1,323,835,200
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjuaian pada Tempatnya		60	%	80	%	147,169,870
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	1	Dokumen	1	Dokumen	72,159,870
3.30.03.2.02.0002	Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	1	Dokumen	1	Dokumen	75,000,000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK		7,40	%	7	%	300,304,906
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		96	Kali	73	Kali	300,304,905

Rencana Kerja (Ranja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paga Indikatif
3.30.04.2.02.0001	Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	Kab. Balangan	23 Kali		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 Kali	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1 Laporan	830,642,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	300,304,905
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR		50 %	1,973,984,500			70 %	200,000,000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Mist Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor		33.33 %	1,973,984,500			86.76 %	200,000,000
3.30.05.2.01.0002	Farmasi Dagang Nasional	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat		5 Pelaku usaha				16 Pelaku usaha	
3.30.05.2.01.0004	Mist Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Kab. Balangan	15 Pelaku usaha	1,522,384,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0 Pelaku usaha	
3.30.07	PROGRAM PENGGUAMAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSERTISE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	Kab. Balangan	4 Pelaku usaha	51,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Pelaku usaha	200,000,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan		7.86 %	56,600,000			37.5 %	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berhasil	Kab. Balangan	1,350,000.000	50,000,000			1,680,000,000	
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kerajinan dengan nilai, marketing, perhotelan dan jasa akomodasi		33.33 %				37.50 %	
				20 UMKM				0 UMKM	

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana	Catatan Penting	Prasaram Maju Rencana Tahun 2025	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ INDIKATIF
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN		89.23	578.639.200			76.92	500.000.000
				25.00				29.18	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SOM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi sebagai berikut:		1	578.639.200			2	600.000.000
				1300				1.400	
				150				100	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat timbang, alat ukur, alat timbang, dan alat perimbangan diura utang	Kab. Belalang	1300	486.010.700			1.400	300.000.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Peryuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Kab. Belalang	50	82.623.500			50	200.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI		13.00	3.937.611.600			14.00	250.000.000
				5	3.937.611.600			5	250.000.000
3.31.02.2.01.0000	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi		320				350	250.000.000
				1	3.937.611.600			1	250.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN UJAH USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM		1.98	75.536.600			2.11	75.000.000

Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian: Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	Jumlah IKM yang memiliki Izin		82	IKM		120	IKM	75.000.000
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian penanaman benih melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian penanaman benih melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa) yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Balangan	1	Dokumen		1	Dokumen	75.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG		1.56	%		2.53	%	1.270.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Milai Pemasaran Produk IKM Bersertifikasi		273.62	Rp		284,05	Rp	1.270.000.000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain terkait Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi		148	IKM		156	IKM	
3.31.04.2.01.0002	Dominasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINa Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain terkait Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	Kab. Balangan	1	Dokumen		1	Dokumen	170.000.000
		Jumlah Dokumen hasil Dominasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINa Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	1	Dokumen		1	Dokumen	1.100.000.000
		JUMLAH PAGU INDIKATIF							32.353.819,034



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja tahun 2024 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain **input** yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. **Input** dan **proses** akan memberikan **benefit** dan **impact** kepada **output** maupun **outcome**, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada didalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penancangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, 17 Juli 2023
Kepala Dinas, 



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Parangin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. dkukmpp@balangankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/100/SK/DKUKMPP-BLG/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - e. melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;

g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Nopember 2022

Kepala Dinas, 

AIDINNOR, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670817 198509 1 001

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/100/SK/DKUKMPP-BLG/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	AIDINNOR, S.Sos NIP. 19670817 198509 1 001	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	H. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 19650126 198802 1 003	Sekretaris Dinas	Ketua
3	SAHRIL, S.Kom NIP. 198511272010011014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	RIZA KURNIAWAN, S.STP, M.IP NIP. 19870328 200602 1 001	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
5	NOOR MAGFIRAH, SE NIP. 19700216 200003 2 003	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Anggota
6	M. SAIFUL BAHRI, S.Pd NIP. 19690604 199403 1 009	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
7	AKHMAD HAIRANI, S.Sos NIP. 19740205 200501 1 012	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
8	AHMAD BUHARI, A.Md NIP. 19750306 201001 1 010	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	ERWIN WAHYUNI, S.Sos NIP. 19811110 200701 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	AHMAD MISRANI, SE NIP. 19730619 200501 1 013	Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
11	HAFIZUDDIN, S.Pd NIP. 19820515 200803 1 001	Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
12	SUKMAWATI, SE NIP. 19840521 200501 2 005	Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
13	EKA MAYA JURaida, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
14	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas K metrologian Ahli Muda	Anggota
15	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
16	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
17	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
18	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19	MAKMUR RAJABI, S.Sos NIP. 19800909 200701 1 016	Plt. Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Nopember 2022

Kepala Dinas. 

AIBINNOR, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670617 198509 1 001